

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terjadinya *restatement* atau penyajian kembali laporan keuangan pada sebuah perusahaan yang ada di Indonesia merupakan suatu fenomena yang akan menjadi pusat pertanyaan bagi para investor, mengapa perusahaan tersebut melakukan penyajian kembali laporan keuangan *restatement*, sedangkan laporan keuangan adalah sebuah informasi yang menjadi pokok pertimbangan untuk para investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Para pemakai laporan keuangan khususnya investor banyak melakukan pengambilan keputusan pada laporan laba, maka dari itu laporan keuangan yang disajikan kembali oleh sebuah perusahaan merupakan hal yang benar-benar harus dipertimbangkan akan ada banyak anggapan dari masyarakat dan para pemegang saham tentang perusahaan yang melakukan penyajian ulang laporan keuangan atau *restatement* dengan saham modal ke perusahaan tersebut.

Penyajian laporan keuangan oleh perusahaan *go public* merupakan hal yang dipertimbangkan oleh regulator, perusahaan pelapor, dan auditor dalam menilai kualitas laporan keuangan. (Palmrose dan Scholz, 2004) dalam penyajian laporan keuangan perusahaan, tidak jarang menemukan hal-hal yang menyebabkan laporan keuangan harus direvisi ataupun disajikan kembali, baik itu disebabkan karena adanya kekeliruan perhitungan matematis, kekeliruan penerapan kebijakan akuntansi, kecurangan, kelalaian, adanya penerapan kebijakan akuntansi yang baru ataupun karena adanya perubahan estimasi akuntansi.

SEC mengungkapkan bahwa penyajian kembali laporan keuangan adalah indikator yang paling mudah untuk melihat akuntansi yang salah dan merupakan sumber dari investigasi baru, keraguan terhadap ketepatan pengambilan keputusan tersebut, karena informasi yang digunakan terdahulu ternyata tidak dapat diandalkan. (Anderson dan Yhon, 2002), meneliti bahwa pada median hari

ke tujuh terdapat *abnormal return* negative sebesar 3,79% pada saat pengumuman laporan keuangan. Mereka menyimpulkan bahwa reaksi investor akan pengumuman laporan keuangan pada saat isu pengakuan pendapatan pada hari ke tujuh CARnya negative sebesar 7,94%.

Berdasarkan penelitian tersebut untuk mengukur perubahan kepercayaan investor dilakukan regresi secara kuartal pada laba yang tidak diharapkan selama 3 hari di sekitar pengumuman laba dan hasilnya menunjukkan bahwa koefisien respon laba secara signifikan lebih kecil setelah *restatement*. Oleh sebab itu setelah perusahaan *merestate* laporan keuangan, investor kurang menyadari akan koefisien respon laba untuk mengevaluasi perusahaan tersebut.

Penyajian kembali atau *restatement* yang dilakukan oleh PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (persero) Tbk (2014), kasus penyajian kembali laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan ini dikarenakan pengaruh perubahan kurs valuta asing dimana perusahaan mengubah mata uang penyajian laporan keuangan dari mata uang rupiah menjadi mata uang dollar amerika (*wordpress.com*, 2014). Kegiatan penyajian kembali laporan keuangan atau *restatement* yang banyak dilakukan perusahaan membuat beberapa kalangan memandang kasus ini sebagai akibat dari lemahnya sistem *good corporate governance* perusahaan dalam membuat dan mengawasi proses pembuatan laporan keuangan.

Good corporate governance (GCG) merupakan sistem tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. GCG sendiri mulai dikenal di Indonesia pada saat Indonesia mengalami krisis hebat pada tahun 1998, dan GCG dinilai mampu membantu perusahaan untuk melepaskan diri dari jeratan krisis berkepanjangan. Oleh karena itu, pemerintah maupun investor mulai memusatkan perbaikan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG.

Salah satu unsur dalam pembentukan *coporate governance* adalah dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan inti *corporate governance* yang

ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Beberapa tugas dewan komisaris untuk mencegah munculnya *going concern* meliputi, monitoring penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset, memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan (Chandra, 2012).

Unsur *corporate governance* lainnya adalah komite audit. Peran komite audit Komite audit perlu menelaah hasil pekerjaan dari internal auditor, komite audit juga dapat mempengaruhi dan membantu pihak manajemen dalam penunjukan auditor dari kantor akuntan publik. Komite audit haruslah orang yang kompeten dan memiliki kinerja yang berkualitas. Untuk itu anggota dari komite audit sekurang-kurangnya haruslah ada yang memiliki latar belakang akuntansi dan memiliki pengalaman di bidang audit, sehingga memiliki pemahaman tentang isu-isu terkini tentang permasalahan akuntansi. Dengan demikian perlu adanya kerjasama yang baik antara komite audit dengan internal auditor (Astuti, 2010). Peraturan tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit pada perusahaan publik telah diatur dalam salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 55/POJK.04/2015. Komite audit diangkat oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab terhadap dewan komisaris. Ukuran komite audit menjadi faktor yang harus diperhatikan, tujuannya agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Menurut KNKG, komite audit dipimpin oleh seorang komisaris independen dan setidaknya 2 (dua) orang anggota. Selain memperhatikan ukuran, independensi menjadi karakteristik yang sangat penting bagi komite audit. Semakin independen komite audit, maka semakin besar kemungkinan untuk dapat melakukan pengawasan pelaporan keuangan yang lebih efektif karena komite audit tidak dipengaruhi oleh manajemen. independensi komite audit diharapkan dapat mengatasi konflik kepentingan oleh auditor luar yang menyediakan jasa konsultasi bagi perusahaan (Agrawal et al.,2005).

Selain dewan komisaris dan komite audit, struktur kepemilikan merupakan bagian penting dalam proses implementasi *good corporate governance*. kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada nilai perusahaan, dimana para manajer memiliki kepentingan pribadi yang cenderung dipenuhinya dibandingkan pencapaian tujuan perusahaan. Terkait dengan penetapan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, perusahaan sebaiknya perlu melakukan pertimbangan secara hati-hati sehingga *agency cost* dapat diminimalkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Bagi penelitian dapat mempertimbangkan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai perusahaan dengan menambah variable *intervening* atau dengan faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah nilai perusahaan, seperti kebijakan deviden, *corporate social responsibility*, rasio kinerja keuangan dan *investment opportunity set* (Wida, 2010).

Penelitian mengenai pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap keterjadian *restatement* telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya (Abdullah, 2010) yang meneliti pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap keterjadian *financial restatement* menemukan bahwa *restatement* terjadi pada perusahaan yang independensi komite nominasinya rendah serta memiliki proporsi kepemilikan manajerial yang tinggi, selain itu independensi komite audit berhubungan dengan keterjadian *earning restatement*. Penelitian serupa mengenai pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap keterjadian *restatement* juga telah dilakukan oleh (Veronica, 2005) yang menemukan bahwa independensi komisaris, proporsi kepemilikan saham, dan kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap keterjadian *restatement*. Sedangkan (Larry, 2011), menyatakan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap keterjadian *earning restatement*. Hal ini diperkuat dengan penelitian (Rani, 2011) yang menyatakan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap keterjadian penyajian laba kembali.

Dari hasil berbagai penelitian di atas, terdapat hasil yang tidak konsisten

antara penelitian satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena perbedaan metode pengukuran setiap variabel dan sampel. Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh (Ran, 2011 dan Pertiwi, 2012) menggunakan sampel perusahaan yang melakukan *restatement*, namun tidak diidentifikasi dan diklasifikasikan lebih lanjut mengenai faktor penyebab *restatement*. *Restatement* yang disebabkan oleh penerapan PSAK baru, proses akuisisi yang sesuai PSAK, perubahan metode akuntansi yang baru, dan *stocksplits* tidak dimasukkan sebagai sampel karena faktor-faktor tersebut tidak mengindikasikan adanya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dan tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian (Widyaningrum, 2015) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan kepemilikan saham intitusional berpengaruh negatif terhadap keterjadian *restatement*. Sedangkan independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, dan kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kedua karakteristik *corporate governance* mempengaruhi keterjadian *restatement*.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian (Widyaningrum, 2015) perbedaan penelitian ini ada pada tahun pengambilan data yang dilakukan pada perusahaan manufaktur tahun 2012-2015 dengan variabel yang terkait adalah yaitu: dewan komisaris, independensi dewan komisaris, komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Dan penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berjudul “**Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap penyajian kembali laporan keuangan?
2. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap penyajian kembali laporan keuangan?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap penyajian kembali laporan keuangan?
4. Apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap penyajian kembali laporan keuangan?
5. Apakah keahlian keuangan komite audit berpengaruh terhadap penyajian kembali laporan keuangan?
6. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penyajian kembali laporan keuangan?
7. Apakah kepemilikan institutional berpengaruh terhadap penyajian kembali laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap penyajian kembali laporan keuangan..
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh independensi dewan komisaris terhadap penyajian kembali laporan keuangan..
3. membuktikan secara empiris pengaruh ukuran komite audit terhadap penyajian kembali laporan keuangan..
4. membuktikan secara empiris pengaruh independensi komite audit terhadap penyajian kembali laporan keuangan..
5. membuktikan secara empiris pengaruh keahlian komite audit terhadap penyajian kembali laporan keuangan..
6. membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap

penyajian kembali laporan keuangan..

7. membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap penyajian kembali laporan keuangan..

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diperlukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak - pihak berikut:

1. Bagi akademisi, diharapkan dapat melengkapi temuan empiris yang telah ada dan bagi penelitian selanjutnya dapat dijadikan referensi dan acuan.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan pencegahan tindakan kecurangan keuangan dan menjelaskan dampak yang tidak efektif jika perusahaan mengalami *restatement* dalam laporan keuangannya.
3. Bagi pembaca, penelitian ini bias mnejadi informasi untuk mengetahui mengapa sebuah perusahaan melakukan penyajian kembali laporan keuangannya, dan mengetahui apa saja yang mempengaruhi sebuah penyajian laporan keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Bagian sistematika penulisan mencakup uraian ringkasan dari materi yang dibahas pada skripsi ini. Penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi yang akan dibagi dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan Teori yang merupakan acuan pemikiran dalam pembahasan masalah yang diteliti dan mendasari analisis yang diambil dari berbagai literatur, ringkasan penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, konsep dan hipotesis, dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang cara-cara meneliti yang menguraikan variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan. Bab ini juga menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab inti dalam laporan penelitian ini. Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi hasil analisis pembahasan objek penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari laporan penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian, maupun bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN